

ABSTRAK
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)

Oleh
TRINIVO TANOUCI

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Di Provinsi Lampung terdapat 11 LKM yang beragam yang dimana dapat timbul beberapa permasalahan. Peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan diperlukan dalam rangka mengawasi perkembangan LKM yang dinamis, stabil dan berkelanjutan serta memberi rasa aman atas perlindungan terhadap konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh OJK.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *non judicial case study*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa OJK Provinsi Lampung telah berperan secara optimal dalam pengawasan operasional LKM, pengawasan yang dilakukan oleh OJK Lampung melalui pengawasan *on site* dan pengawasan *off site* meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. OJK dalam proses pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung tidak mengalami hambatan, hanya saja terjadinya permasalahan yaitu kuantitas dan kualitas SDM LKM yang belum dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasional LKM.

Saran dalam penelitian ini OJK Provinsi Lampung diharapkan dapat melakukan pembinaan SDM LKM agar berkualitas sehingga dapat menunjang kegiatan operasional LKM. OJK diharapkan dalam membuat peraturan terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan harus secara tegas dijelaskan didalam peraturan.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro, OJK, Pengaturan dan Pengawasan